

Sejarah Sosial Peradaban Dinasti Aghlabiyah: Periode Kejayaan Hingga Keruntuhan

Hanissa Wandansari Sihombing¹ Afrizal² Sawaluddin³

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: hanissawandansari1@gmail.com¹ afrizal.m@uin-suska.ac.id²
regarsawaluddin@gmail.com³

Abstract

This article examines the significance of social history in the trajectory of the Aghlabid Dynasty (800-909 AD), tracing its progression from a phase of consolidation to its eventual collapse in North Africa. This study examines the process of the Aghlabiyah dynasty's formation and subsequent collapse, while analyzing the social dynamics that emerged during its establishment. This study employs a socio-historical analysis methodology, utilizing data collection techniques that include a comprehensive literature review of pertinent historical sources. This study reveals that Aghlabid society was characterized by ethnic diversity and intricate hierarchies, resulting in complex dynamics. The dynamics between the rulers and the scholars, along with other elites and ethnic groups, frequently exhibited tensions that had the potential to weaken the regime's internal stability. The policies enacted by the rulers appeared to intensify social discontent and heighten societal polarization. The evidence suggests that internal social factors, including divisions within the elite and discontent stemming from religious authority or prevailing social conditions, significantly contributed to the increased vulnerability and eventual downfall of the Aghlabid Dynasty when confronted with Fatimid power.

Keywords: Aghlabid, North Africa, Society

Abstrak

Artikel ini mengkaji sejarah sosial peradaban dalam perjalanan Dinasti Aghlabiyah (800-909 M) dari fase konsolidasi hingga keruntuhan di Afrika Utara. Penelitian ini berfokus pada proses pembentukan dinasti Aghlabiyah hingga keruntuhannya, serta menganalisis dinamika sosial yang terjadi selama masa berdirinya dinasti tersebut. Peneliti menerapkan pendekatan analisis sosial-historis dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan kajian pustaka terhadap sumber-sumber sejarah yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Aghlabiyah terdiri dari keragaman etnis dan hierarki berlapis yang menghasilkan dinamika yang kompleks. Interaksi antara penguasa dan ulama, serta kaum elit lainnya dan kelompok etnis, sering kali diwarnai oleh ketegangan yang dapat menggerogoti kekuatan rezim dari dalam. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh penguasa cenderung memperburuk ketidakpuasan sosial serta meningkatkan polarisasi di masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa elemen-elemen sosial internal, seperti perpecahan di kalangan elit dan ketidakpuasan yang dipicu oleh otoritas keagamaan atau kondisi sosial, memainkan peran penting dalam meningkatkan kerentanan dan pada akhirnya menyebabkan keruntuhan Dinasti Aghlabiyah di hadapan kekuatan Fatimiyah.

Kata Kunci: Aghlabiyah, Afrika Utara, Sosial



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dinasti Abbasiyah menandai fase transformatif dalam sejarah Islam dengan mengutamakan penguatan peradaban dan konstruksi budaya melalui prioritas strategisnya yang menitikberatkan pada pengembangan masyarakat Islam dalam kerangka sosio-kultural dan intelektual. Kebijakan ini tidak hanya mendorong kemajuan multidisipliner, khususnya dalam bidang keilmuan, tetapi juga membentuk identitas berbeda dari pendahulunya, yakni

Dinasti Umayyah yang lebih mengedepankan ekspansi wilayah sebagai instrumen kekuasaan.¹ Meskipun pencapaian ini mencerminkan keberhasilan intelektual Abbasiyah, namun tanpa sengaja menciptakan kesenjangan politik-ekonomi antara pusat dan daerah pinggiran. Implikasi yang terjadi yaitu fragmentasi politik yang ditandai dengan munculnya entitas-entitas otonom di kawasan Afrika Utara yang secara progresif melepaskan diri dari hegemoni Abbasiyah. Dinasti Aghlabiyah merupakan salah satu entitas politik otonom awal yang muncul di bawah kekhalifahan Abbasiyah di wilayah Ifriqiya (Afrika Utara) dan bertahan selama lebih dari satu abad (800-909 M).² Dalam terminologi Arab, daerah Ifriqiyah merupakan bagian dari Afrika Utara yaitu wilayah Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Seluruh wilayah tersebut dikenal dengan sebutan *Al-Maghribi*.³ Dinasti Aghlabiyah muncul di tengah latar belakang kekacauan politik dan sosial yang melanda Ifriqiyah pasca-penaklukan awal muslim yang ditandai dengan pemberontakan kelompok Khawarij dan Berber, ketidakstabilan militer *jund Arab*, serta masalah finansial pada masa pemerintahan gubernur Abbasiyah sebelumnya.⁴

Walaupun tidak sepopuler dinasti-dinasti besar lainnya, Dinasti Aghlabiyah berperan dalam membentuk lanskap politik, ekonomi, dan budaya di Afrika Utara pada abad ke 9 hingga 10 M. Peran mereka dalam pembangunan, ekspansi wilayah, dan interaksi dengan kekuatan-kekuatan Mediterania lainnya menunjukkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap sejarah kawasan tersebut. Selama hampir seratus tahun berkuasa, Aghlabiyah berhasil menciptakan stabilitas awal dan mencapai kemakmuran ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan perdagangan maritim. Selain itu, mereka juga melaksanakan ekspansi militer yang signifikan ke wilayah Mediterania, dengan penaklukan Sisilia sebagai salah satu momen yang mengubah peta geopolitik regional. Berdasarkan konteks tersebut, masalah penelitian utama yang akan dieksplorasi dalam artikel ini adalah Bagaimana hubungan antara kondisi Ifriqiyah pra-Dinasti Aghlabiyah dan aspek sosial yang melatarbelakangi kejayaan dan keruntuhan dinasti Aghlabiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada berbagai aspek. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman mengenai sejarah sosial peradaban Islam di wilayah Afrika Utara, khususnya pada periode Aghlabiyah, dengan menyajikan analisis mengenai dimensi sosial yang sering kali terabaikan dibandingkan dengan aspek politik atau militer yang lebih dominan. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi kompleks antara kekuasaan, agama, dan masyarakat dalam konteks Aghlabiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya berfokus pada analisis sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan sejarah Dinasti Aghlabiyah. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis literatur akademis seperti buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, bab dalam buku, dan sumber primer klasik yang tersedia. Mengumpulkan informasi tentang pembentukan dinasti, struktur sosial-ekonomi, kemajuan politik dan militer (khususnya ekspedisi maritim), hubungan dengan Kekhalifahan Abbasiyah dan kekuatan regional lainnya, dan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhannya.

¹ Nunzairina, "Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan Dan Kebangkitan Kaum Intelektual," *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 3, no. 2 (January 2020): 93–103.

² Ajeng Kartini and Wahyuni Amalia, *History of Islam* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2023).

³ Ahmad Mustaghfirin, "Islamisasi Di Afrika Sub-Sahara," *Dirasat: Jurnal Studi Islam dan Peradaban* 14, no. 2 (2019): 129–146.

⁴ Hugh Kennedy, "The Origins of The Aghlabids," in *The Aghlabids and Their Neighbors*, ed. Maribel Fierro et al., vol. 122 (Boston: Brill, 2018), 33–48.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat Ifriqiyah Pra-Dinasti Aghlabiyah

Masyarakat Ifriqiyah menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi. Komponen utama terdiri dari Arab, yang merupakan keturunan penakluk awal dan migran selanjutnya, termasuk elit penguasa Aghlabiyah, serta Berber, yang merupakan penduduk asli Maghreb. Mayoritas penduduk di wilayah Ifriqiyyah adalah suku Berber yang hidup nomaden, bertani, dan berkelompok. Mereka berintegrasi membentuk peradaban dengan penakhluk Arab. Masyarakat Berber juga dikenal dengan nama Masmudah, Sanhaja, dan Zenata. Walaupun terdapat keseragaman dalam kultur mereka, namun mereka tidak pernah membentuk rezim negara.⁵ Selain itu, terdapat populasi non-Arab Muslim lainnya, seperti Persia, serta komunitas non-Muslim *Dzimmi*, termasuk Yahudi dan sisa-sisa populasi Kristen lokal atau yang berasal dari wilayah taklukan seperti Sisilia. Terdapat juga Mawali, yaitu non-Arab yang memeluk Islam, serta budak dari berbagai asal-usul, termasuk Saqaliba dari Eropa, budak dari Afrika Sub-Sahara, dan tawanan perang. Menjelang munculnya Dinasti Aghlabiyah, wilayah Ifriqiyah mengalami instabilitas signifikan akibat serangkaian gejolak internal. Ketidakamanan kronis muncul akibat pemberontakan berkala oleh kelompok Khawarij dan suku-suku Berber yang menentang otoritas pusat, serta pemberontakan internal di kalangan *jund* Arab yang melemahkan kekuatan militer pemerintah. Ketidakstabilan politik dan militer yang berkelanjutan ini secara langsung mempengaruhi masalah keuangan negara yang serius, terutama akibat gangguan pada sistem pemungutan pajak. Gabungan resistensi lokal, ketidakdisiplinan militer, dan kesulitan finansial menghasilkan kondisi kekacauan yang menghambat pemerintahan.

Masyarakat Berber bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dengan cara bergabung dengan khawarij yang gencar menolak kaum elit dan enggan membayar pajak wajib (*upeti*). Bagi Berber, kelompok khawarij tampak menarik karena mereka terlihat seperti identitas Muslim yang unik. Meskipun asal usul Khawarij berasal dari lingkungan Arab Basrah di awal Islam, sumber-sumber menjelaskan bahwa mayoritas besar pengikut sekte ini di Maghrib adalah Berber yang tinggal dalam kelompok-kelompok suku di daerah pegunungan yang mengelilingi dataran Tunisia. Pemberontakan sering terjadi di pinggir, tetapi terkadang juga mengancam pusat provinsi. Selain itu, pasukan militer (*jund*) yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan melawan Berber juga terlibat dalam pemberontakan dengan alasan ketidakpuasan terhadap gaji. Sumber dana lokal Ifriqiya tidak cukup untuk membayar gaji pasukan militer yang besar, disebabkan oleh keengganan pemerintah pusat di Baghdad untuk memberikan dukungan keuangan yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada subsidi keuangan dari Mesir, yang juga bersifat tidak menentu, sehingga menghasilkan kondisi yang tidak stabil bagi setiap gubernur.⁶

Pada masa revolusi Abbasiyah, Ifriqiya berada di bawah pemerintahan gubernur bernama Abdul Rahman bin Habib al-Fihri, yang berasal dari keluarga yang memiliki reputasi tinggi. Namun, ia dibunuh oleh anaknya sendiri pada tahun 755, yang didorong oleh ambisi politik dan ketidaksabaran yang mencolok. Mereka merasa cemas bahwa ayah mereka mungkin akan memilih individu lain sebagai penerus, atau bahwa perubahan dalam situasi politik yang tidak stabil dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menguasai Ifriqiyah. Pada waktu itu, tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk menggantikan gubernur atau penguasa otonom. Situasi ini menciptakan peluang signifikan untuk persaingan di antara saudara, antara ayah dan anak, serta antara rival dari faksi yang

⁵ Marzuenda, "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam (Islam Di Afrika Utara Dan Afrika Selatan)," *Kreatifitas Jurnla Ilmiah Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 2021).

⁶ Kennedy, "The Origins of The Aghlabids."

berbeda. Suku Berber, di bawah kepemimpinan Imam Abu'l-Khattab, memanfaatkan situasi kacau untuk merebut Qayrawan, yang pada waktu itu menjadi pusat kekuasaan di Ifriqiya. Pemerintahan di Qayrawan akhirnya diserahkan kepada 'Abd al-Rahman bin Rustam, rekan Abul-Khattab yang berasal dari Iran.⁷

Kabar jatuhnya Qayrawan ke tangan Berber dilihat sebagai prospek bahwa wilayah *Maghrib* akan diperintah oleh entitas Berber yang antagonis terhadap kekhalifahan Abbasiyah. Ini menunjukkan masalah serius bagi otoritas pusat dan ancaman kehancuran bagi kekuasaan Arab di wilayah tersebut. Menghadapi situasi tersebut, Khalifah al-Mansur mengambil keputusan melakukan tindakan militer yang tegas dengan mengirimkan pasukan (*jund*) berjumlah sekitar 40.000 prajurit yang dipimpin oleh 28 komandan (*quwwad*), di bawah pimpinan Muhammad bin al-Ash'ath al-Khuza'i. Keputusan ini mungkin juga dipicu oleh permintaan bantuan dari "orang Arab Ifriqiya" yang merasa terancam oleh kekuasaan Berber Khawarij. Pasukan yang dikirim ke Ifriqiya merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki Abbasiyah, bahkan lebih besar dari pasukan yang melindungi Khalifah di Baghdad. Ini menunjukkan betapa vitalnya Ifriqiya dalam pandangan al-Mansur, terlepas dari tantangan internal yang dihadapi kekhalifahan.⁸ Pasukan besar berhasil mengalahkan Abu'l-Khattab dan pengikut Khawarijnya. Ibn al-Ash'ath kemudian diangkat sebagai gubernur di Qayrawan. Qayrawan untuk pertama kalinya diperkuat untuk menunjukkan upaya pengamanan pusat kekuasaan dan bergabung dengan Tunisia menjadi inti dari provinsi yang dikuasai Abbasiyah.

Pasukan *jund* dan keturunan mereka pun menjadi kekuatan militer yang dominan di Ifriqiya selama satu abad berikutnya setelah kedatangan mereka. Kehadiran mereka sangat menentukan kehidupan politik provinsi tersebut. Pada satu sisi, *jund* dianggap cukup berhasil dalam tugas utama mereka, yaitu melindungi Qayrawan dan wilayah dataran di sekitarnya dari ancaman Berber Khawarij. Namun, disisi lain keberhasilan tersebut harus dibayar mahal. Mereka menerima gaji bulanan (*'ata*) dalam bentuk uang logam yang diperkirakan sebanyak 60 dirham per bulan atau 720 per tahun). Dengan jumlah pasukan sebanyak 40.000 orang, total biaya tahunan untuk membayar gaji *jund* adalah sekitar 28.800.000 dirham. Pendapatan Ifriqiya saat itu diperkirakan hanya 13.000.000 dirham ditambah sejumlah karpet, sangat tidak sebanding dengan total biaya gaji *jund* (28.800.000 *dirham*), sehingga jelas terlihat adanya defisit yang sangat besar. Ditambah lagi dengan fakta bahwa *Jund* sepenuhnya bergantung pada gaji bulanan mereka (*'atā*) untuk bertahan hidup karena mereka tidak memiliki basis ekonomi yang lain. Ketergantungan total ini memiliki konsekuensi politik yang serius dimana mereka bersedia mengambil tindakan kekerasan untuk memastikan bahwa mereka dibayar. Situasi ini menciptakan kondisi yang rentan terhadap ketidakstabilan politik dan pemberontakan militer jika pembayaran gaji terganggu, masalah inilah yang sering muncul dan mengganggu stabilitas pemerintahan di Ifriqiya.⁹

Awal Pembentukan Dinasti Aghlabiyah

Wilayah Ifriqiya yang menunjukkan kecenderungan mengalami ketidakstabilan, yang terlihat dari pemberontakan yang menantang otoritas pusat, memerlukan seorang gubernur yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menstabilkannya. Sehubungan dengan itu, khalifah al-Rasyid mengirimkan pasukan ke Ifriqiyah (sekarang Tunisia) di bawah komando Ibrahim ibn al-Aghlab. Dia diakui sebagai individu yang berani dan cerdas, serta memiliki kemampuan strategis yang tinggi, sehingga mampu menghadapi pemberontak khawarij dan musuh-musuh dinasti Abassiyah dengan ketahanan yang luar biasa.¹⁰ Ibrahim mengusulkan

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.hlm. 7

¹⁰ Syamsul Bakri, *Sejarah Kebudayaan Islam*, ed. Agus Wahyudi (Surakarta: Efudepress (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta), 2022).

kepada khalifah agar wilayah Ifriqiyah diberikan kepadanya dan keturunannya secara permanen setelah berhasil melemahkan pemberontakan kelompok Khawarij. Setelah itu, khalifah menerima usulan Ibrahim dan ia diangkat sebagai gubernur Tunis pada tahun 800 M. Dia juga diberi otonomi penuh dan harus membayar pajak tahunan sebesar 40.000 dinar kepada khalifah Baghdad.¹¹ Meskipun Ibrahim telah memiliki daerah otonom sendiri, hubungan dengan khalifah tetap terjalin dengan baik. Mereka secara formal mengakui kekhalifahan Abassiyah, yang dapat dibuktikan melalui penyebutan nama khalifah dalam setiap khutbah jumat. Khalifah juga memberikan hak otonomi penuh untuk mengatur wilayah dan kebijakan politik, termasuk menentukan penggantinya tanpa campur tangan sama sekali.¹² Otonomi ini diberikan sebagai akibat dari jarak geografis yang signifikan antara Afrika Utara dan Baghdad, serta adanya masalah internal dalam dinasti Abassiyah, seperti perselisihan suksesi dan pertikaian, yang menghambat kemampuan mereka untuk terlibat secara langsung dalam urusan atau pengaturan pemerintahan di wilayah tersebut.¹³ Dinasti Aghlabiyah di perintah oleh 11 khalifah, antara lain:

- a. Ibrahim I (179 H/795 M)
- b. Abdullah I (197 H/812 M)
- c. Ziyaadatullah (210 H/817 M)
- d. Abu Ilqal Al-Aghlab (223 H/838 M)
- e. Muhammad I (226 H/841 M)
- f. Ahmad (242 H/856 M)
- g. Ziyaadatullah II (248 H/863 M)
- h. Abu Al-gharaniq Muhammad II (250 H/863 M)
- i. Ibrahim II (261 H/875 M)
- j. Abdullah II (289 H/902 M)
- k. Ziyaadatullah III (290-296 H/903-909 M)¹⁴

Periode Kejayaan Dinasti Aghlabiyah

Setelah menumpas beberapa pemberontakan, pemerintahan Aghlabiyah mengalihkan perhatian pada pengembangan kekuatan maritim yang kuat, terstruktur, dan komprehensif. Aghlabiyah menjadi penguasa Mediterania tengah yang dominan dengan memastikan keamanan wilayah sekaligus memungkinkan proyeksi kekuatan yang signifikan. Hal ini tercermin dalam serangkaian penyerbuan yang diarahkan ke pesisir Eropa, termasuk Italia, Prancis, Corsica, dan Sardinia, yang menjadi target armada Aghlabiyah. Pulau-pulau strategis seperti Malta, yang direbut sekitar tahun 870 M, dan Sardinia berhasil dikuasai, sementara jangkauan serangan mereka meluas hingga ke pusat kekristenan di Roma.¹⁵ Aghlabiyah kemudian melanjutkan serangan ke pulau-pulau lain dan pantai-pantai di Eropa, termasuk berhasil menaklukkan kota-kota pantai Italia seperti Brindisi (836/221 H), Napoli (837 M), Calabria (838 M), Toronto (840 M), Bari (840 M), dan Benevento (840 M). Akibat dari serangan yang terus-menerus oleh pasukan Aghlabiyah terhadap pelabuhan-pelabuhan di Italia (termasuk kota Roma), Paus Yonanes VIII terpaksa meminta perdamaian dan setuju untuk membayar upeti sebesar 25.000 uang perak setiap tahun kepada Aghlabiyah. Pasukan Aghlabiyah berhasil menguasai kota Regusa di pantai Yugoslavia pada tahun 890 M, Pulau Malta pada tahun 869 M, serta melakukan serangan ke pulau Corsica dan Mayorka. Mereka juga menguasai kota Portofino di pantai Barat Italia pada tahun 890, dan kota Athena di Yunani pun berada dalam jangkauan penyerangan mereka.

¹¹ Montgomery Watt W, *Kejayaan Islam Kajian Kritis Dan Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990). Hlm. 109

¹² Imam Fuadi, *Sejarah BPeradaban Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011).

¹³ Clifford Edmund Bosworth, *Islamic Dynasties* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996).

¹⁴ Andi Syahraeni, "Dinasti-Dinasti Kecil Abbasiyah," *Jurnal Rihlah* 4, no. 1 (2016).

¹⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, 10th ed. (London: Macmillan Education, 1970).hlm.450

Masa kejayaan Aghlabiyah ditandai oleh pencapaian militer, khususnya penaklukan Sisilia dari Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh panglima Asad bin Furat. Ekspedisi penaklukan tersebut dimulai secara resmi pada tahun 827 M atas perintah Amir Ziyadatullah I dan melibatkan panglima laut yang memimpin 900 tentara berkuda serta 10.000 pasukan infanteri. Namun sayangnya, penaklukan tersebut merupakan pertempuran terakhir yang dipimpin oleh panglima Asad bin Furat, karena ia meninggal ketika itu.¹⁶ Keberhasilan Aghlabiyah dalam menantang dominasi Kekaisaran Bizantium yang telah lama mapan di Mediterania tengah tersebut menunjukkan pergeseran signifikan dalam konstelasi kekuatan saat itu. Pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa kemampuan maritim yang maju; pembangunan, pemeliharaan, dan operasi armada laut skala besar untuk penjelajahan, penyerbuan, blokade, hingga invasi seperti ke Sisilia, mencerminkan tingkat organisasi, teknologi perkapalan, dan keahlian navigasi yang luar biasa tinggi untuk sebuah kekuatan regional pada masanya, jauh melampaui sekadar aktivitas bajak laut sporadis. Proses penaklukan yang berlangsung lama dan baru selesai sepenuhnya pada tahun 902 M menunjukkan bahwa upaya ini merupakan fokus utama dinasti selama periode tersebut. Penguasaan Sisilia tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Aghlabiyah secara signifikan, tetapi juga menyediakan basis militer yang sangat strategis untuk melaksanakan operasi lebih lanjut ke daratan Italia. Di samping itu, aspek ini berfungsi sebagai momen krusial dalam penyebaran peradaban dan pengaruh Islam ke Eropa secara lebih luas. Selain tujuan memperluas wilayah, penaklukan tersebut juga memiliki tujuan untuk berjihad melawan orang-orang kafir, mengingat wilayah tersebut berfungsi sebagai pusat penting dalam penyebaran peradaban Islam ke Eropa Kristen.¹⁷

Keberhasilan penaklukan-penaklukan tersebut menghasilkan kekayaan yang signifikan bagi Dinasti Aghlabiyah, mendorong para penguasa untuk berinvestasi dalam pembangunan Tunisia dan Sisilia. Ziyadatullah I mendirikan masjid Agung Qayrawan, sementara Amir Ahmad mendirikan masjid Agung Tunis dan juga membangun hampir 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara. Aspek-aspek tersebut tidak hanya mencakup jalan-jalan, pos-pos, armada angkutan, dan irigasi untuk pertanian, terutama di Tunisia Selatan yang memiliki tanah kurang subur, tetapi juga mencakup perkembangan arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan.¹⁸ Dinasti Aghlabiyah juga menunjukkan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Keberadaan kota Qairawan menunjukkan perannya sebagai pusat penting dalam perkembangan mazhab Maliki. Di kota ini lahir sejumlah intelektual Islam terkemuka mazhab Maliki, seperti Yusuf ibnu Yahya, Abu Zakaria al-Kinani, dan Isa ibnu Muslim. Karya-karya yang mereka hasilkan mengenai mazhab Maliki tersimpan dengan rapi di masjid Qairawan. Meskipun dinasti ini tidak tergolong sebagai dinasti besar, kemajuan yang dicapai dalam ilmu pengetahuan dan agama, serta kontribusinya terhadap peradaban Islam, terlihat dengan jelas.

Pembelajaran hukum Islam di Ifriqiya mencapai puncaknya dengan dibawa oleh Asad bin Furat (w. 828), murid dari Malik bin Anas (pendiri mazhab Malik) di Madinah, dan kemudian belajar dengan para ulama Hanafi di Irak. Dalam karya hukumnya al-Asadiyya, ia berusaha menjelaskan ajaran mazhab Malik dari apa yang dia pelajari dari Hanafi. Oleh karena itu, Maliki dan Hanafi menganggapnya sebagai salah satu ulama terkemuka. Namun, Sahnun (murid Ibn al-Furat) adalah figur agama yang lebih terkenal selama periode Aghlabid. Selain terkenal karena keberaniannya dalam mempertahankan keyakinan agamanya di hadapan para penguasa, Sahnun juga mendapat pengakuan ilmiah karena penjelasannya yang menyeluruh tentang sistem hukum Maliki yang disebut al-Mudawanna. Dalam karya ini dan pernyataan hukumnya,

¹⁶ Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. Nurika Khalila Daulay (Medan: Perdana Publishing, 2016). Hlm. 126

¹⁷ Hitti, *History of The Arabs*.

¹⁸ Syahraeni, "Dinasti-Dinasti Kecil Abbasiyah."

Sahnun menentang eklektisisme gurunya (ibn al Furat) dan berusaha menyelaraskan mazhab Maliki di Ifriqiya dengan ajaran yang telah dikembangkan di bawah pendirinya di Madinah. Sahnun dan para ulama menanamkan keyakinan dogmatis pada mazhab hukum Maliki, yang menjadikannya dasar penentangan terhadap pemerintahan Aghlabiyah.¹⁹ Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Dinasti Aghlabiyah memperoleh pendapatan dari berbagai sektor, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Dinasti ini melakukan pembangunan bendungan untuk keperluan irigasi, serta mengembangkan perkebunan anggur dan kurma. Untuk memajukan bidang perdagangan, dilakukan pembangunan jalan-jalan, angkutan, dan pengaturan lalu lintas perdagangan. Dalam upaya mengembangkan sektor industri, Bani Aghlabiyah mendirikan pabrik untuk memproduksi alat-alat pertanian, serta melakukan pengolahan emas, perak, dan produk lainnya. Peningkatan ekonomi ini menyebabkan pemerintahan Dinasti Aghlabiyah beserta seluruh penduduknya mengalami tingkat kemakmuran yang relatif tinggi.²⁰

Periode Keruntuhan Dinasti Aghlabiyah

Menjelang akhir abad ke-9 Masehi, sekitar tahun 890-an, posisi Dinasti Aghlabiyah di Ifriqiyah mulai memperlihatkan indikasi penurunan yang signifikan setelah periode kejayaan. Salah satunya bersumber dari ketegangan sosial dan politik, yaitu konflik antara rezim penguasa dan otoritas keagamaan, khususnya para ulama Mazhab Maliki, serta kebijakan keras yang diterapkan oleh amir Ibrahim II. Para ulama Maliki banyak menemukan kejanggalan dalam sistem pemerintahan Aghlabiyah dan mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam atau tidak adil. Pertama, pengecaman terhadap sistem perpajakan (persepuh dalam bentuk barang yang diperkenalkan oleh Ibrahim I) dianggap tidak sesuai syariah atau memberatkan rakyat. Kedua, kebijakan ekstrem Ibrahim II yaitu tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangannya dalam pembunuhan komandan militer Ifriqiya di istana tanpa alasan yang jelas dan penyaliban seorang bangsawan Arab kaya di Qayrawan yang mengindikasikan adanya ketakutan atau paranoia dari pihak penguasa terhadap potensi ancaman dari dalam elit militer dan aristokrasi Arab. Ketiga, Pembangunan *Raqqada* sebagai Simbol Pergeseran Politik yaitu pembangunan rumah baru Ibrahim II yang berbenteng di Raqqada sejak tahun 876. Pembangunan tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi dipandang oleh Ibrahim II sebagai tanda dimulainya era baru dalam sejarah dinasti.²¹

Keempat, upaya sentralisasi kekuasaan dan penghancuran aristokrasi arab karena ingin otoritas amir tidak lagi dibagi dengan aristokrasi Arab yang selama ini masih bergantung atau dinegosiasikan dengan elit militer dan bangsawan Arab setempat. Untuk mewujudkan sentralisasi kekuasaan absolut, Ibrahim II menjalankan kebijakan brutal yaitu melenyapkan pimpinan militer Arab dan merampas harta para pemimpin Arab yang berkuasa. Ini adalah strategi sistematis untuk menghancurkan basis kekuatan ekonomi dan militer aristokrasi yang menjadi saingannya. Kelima, mengandalkan pasukan budak sebagai pengganti kekuatan militer yang berbasis pada *jund* Arab yang loyalitasnya dipertanyakan atau kekuasaan politiknya ingin dihancurkan. Ibrahim II secara signifikan menambah jumlah pasukan budak kulit hitamnya hingga 10.000. Pasukan budak (seperti Saqaliba yang disebutkan dalam konteks lain) seringkali lebih bergantung secara mutlak pada penguasa yang membelinya dan memberikan mereka posisi, sehingga dianggap lebih loyal daripada pasukan yang memiliki ikatan kesukuan atau sosial lokal seperti *jund* Arab. Ini adalah langkah tipikal penguasa yang ingin membangun kekuatan pribadi yang tidak terpengaruh oleh faksi-faksi domestik.²² Konflik semakin

¹⁹ Jamil M. Abun Nasr, *A History of The Maghrib in The Islamic Period*, 2nd ed. (London: Cambridge University Press, 1975). Hlm. 53

²⁰ Syahraeni, "Dinasti-Dinasti Kecil Abbasiyah."

²¹ Kennedy, "The Origins of The Aghlabids."

²² Abun Nasr, *A History of The Maghrib in The Islamic Period*.

memburuk pada periode pemerintahan amir terakhir, Ziyadatullah III (berkuasa 903-909 M). Alih-alih memberikan perhatian pada tata kelola negara dan ancaman yang muncul, Ziyadatullah III terjebak dalam kemewahan istana dan gaya hidup yang berlebihan. Perilaku penguasa yang mengabaikan urusan publik dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi ini secara langsung mengganggu legitimasi serta efektivitas pemerintahannya di hadapan masyarakat dan elit.

Kemunduran ini memiliki dampak yang lebih luas dan tidak terbatas pada aspek pribadi amir saja. Saat bersamaan, terdapat masalah signifikan dalam struktur kekuasaan Aghlabiyah itu sendiri. Sejumlah pembesar dan pejabat istana mulai menunjukkan kecenderungan yang jelas atau bahkan secara terbuka terpengaruh oleh doktrin Syi'ah. Perubahan afiliasi atau simpati keagamaan di kalangan elit ini menimbulkan potensi risiko yang signifikan, terutama karena bersamaan dengan meningkatnya aktivitas propaganda Syi'ah Ismailiyah yang dipromosikan oleh Abu Abdullah al-Shi'i dari kalangan Dinasti Fatimiyah. Abu Abdullah secara strategis memanfaatkan ketidakpuasan yang ada terhadap pemerintahan Aghlabiyah dan mengajukan alternatif kepemimpinan Islam di bawah naungan Ahl al-Bayt (keluarga Nabi). Strategi dakwah Abu Abdullah al-Shi'i menunjukkan efektivitas yang tinggi, terutama dengan fokus kegiatannya di wilayah pedalaman Ifriqiyah, di mana ia berhasil menanamkan pengaruh yang signifikan di kalangan suku-suku Berber. Suku Berber yang memiliki sejarah panjang dalam perlawanan terhadap kekuasaan sentral Arab dan sering kali merasa kurang terwakili atau tertindas, merespons seruan Abu Abdullah yang menawarkan keadilan dan perubahan. Pengaruh ini segera terwujud melalui dukungan yang nyata yaitu Abu Abdullah berhasil mengorganisir kekuatan militer yang signifikan dari pengikut berbernya. Kekuatan militer yang berakar pada Berber ini secara aktif melancarkan pemberontakan berskala besar terhadap pemerintahan Aghlabiyah menandai awal dari fase konflik bersenjata yang krusial.

Serangan militer yang dilakukan oleh pasukan Fatimiyah di bawah pimpinan Abu Abdullah menunjukkan kekuatan yang melebihi kemampuan Dinasti Aghlabiyah, yang telah mengalami kelemahan internal dan dipimpin secara tidak efektif oleh Ziyadatullah III. Pertempuran demi pertempuran berhasil dimenangkan oleh pasukan Fatimiyah, yang didorong oleh motivasi tinggi dan dukungan dari populasi lokal Berber. Dalam menghadapi kekalahan yang tampaknya tidak dapat dihindari, Ziyadatullah III melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan dari penguasa nominalnya, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Namun berbagai upaya untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiyah demi menyelamatkan Dinasti Aghlabiyah tidak membuahkan hasil karena Abbasiyah sendiri sedang menghadapi tantangan internal dan kesulitan dalam memproyeksikan kekuatan sejauh Ifriqiyah. Dinasti Aghlabiyah mengalami kekalahan di tangan Fatimiyah pada tahun 909 M, yang menandakan akhir dari kekuasaan mereka. Ziyadatullah III terpaksa melarikan diri dan akhirnya diusir ke Mesir, meninggalkan Ifriqiyah yang kini berada di bawah kendali Dinasti Fatimiyah yang baru berdiri.²³

Dinamika Peradaban Sosial Dinasti Aghlabiyah

Proses berdirinya dan runtuhnya Dinasti Aghlabiyah terkait erat dengan dinamika sosial yang berlangsung pada periode tersebut. Analisis sosial menunjukkan bahwa masyarakat di Ifriqiyah pada periode tersebut sangat beragam dan kompleks, yang terdiri dari campuran berbagai suku bangsa dan golongan, yakni orang Arab dari berbagai asal, suku Berber sebagai penduduk mayoritas asli, orang non-Arab yang memeluk Islam (*Mawali*), budak dari berbagai tempat (termasuk Eropa dan Afrika), serta penduduk non-Muslim (*Dzimmi*). Struktur sosialnya pun terdiri dari lapisan-lapisan yang dimulai dari keluarga penguasa Aghlabiyah sebagai puncak tertinggi, diikuti oleh kelompok bangsawan dan elit (baik Arab maupun non-Arab), pemuka agama (ulama mazhab Maliki), rakyat biasa (petani, pedagang kecil, pengrajin), hingga golongan

²³ Bosworth, Islamic Dynasties.hlm.31

Mawali, budak, dan *Dzimmi* di lapisan terbawah. Keberagaman dan stratifikasi sosial ini menghasilkan berbagai interaksi antar kelompok yang tidak selalu mudah dipahami. Terdapat dinamika hubungan yang kadang-kadang tegang, seperti antara penguasa/bangsawan Arab dengan suku-suku Berber yang terkadang memberontak, bahkan hubungan persaingan kekuasaan di antara sesama bangsawan Arab. Namun di sisi lain terdapat pula interaksi yang bersifat berbaur, contohnya melalui perkawinan atau kegiatan ekonomi bersama. Hubungan yang krusial terjalin antara penguasa dan pemuka agama (khususnya ulama Mazhab Maliki) yang memiliki pengaruh signifikan dan dihormati oleh mayoritas masyarakat. Ulama berfungsi sebagai pengawal ajaran agama dan sering kali menunjukkan keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan nilai-nilai agama – ini dikenal sebagai bentuk "penentangan yang bermoral" yang mendapat dukungan dari masyarakat.

Oleh karena itu, metode interaksi yang diterapkan oleh pemerintah Aghlabiyah terhadap berbagai kelompok ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan kelangsungan pemerintahan. Kebijakan yang tegas terhadap kelompok tertentu, beban pajak yang memberatkan masyarakat (serta mendapat kritik dari para ulama), atau tindakan penguasa yang dianggap tidak adil, semuanya menimbulkan ketidakpuasan dan perpecahan di dalam masyarakat. Dinamika sosial yang kompleks ini bukan hanya sekadar latar belakang, melainkan merupakan kekuatan aktif yang berperan dalam menentukan sejauh mana kekuatan atau kelemahan pemerintahan Aghlabiyah dari waktu ke waktu. Aspek-aspek sosial ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mengapa Dinasti Aghlabiyah yang meskipun sempat mencapai kejayaan militer di Mediterania, namun pada akhirnya mengalami kemunduran karena tidak mampu bertahan menghadapi tantangan seperti kemunculan Dinasti Fatimiyah yang berhasil memanfaatkan ketidakpuasan sosial yang ada.

KESIMPULAN

Selama periode penting dari abad kesembilan hingga awal abad kesepuluh Masehi, dinasti Aghlabiyah berperan penting dalam pembentukan masyarakat Ifriqiyah. Kemunculannya berhasil mengakhiri masa kekacauan yang lama yang disebabkan oleh pemberontakan internal yang berulang dari kelompok Khawarij dan suku Berber, serta perselisihan dalam unit militer *jund* Arab. Masalah keuangan yang melanda pemerintahan sebelumnya memperparah kekacauan ini. Ifriqiyah, dengan pusat di Qayrawan, berkembang menjadi masyarakat yang rumit dan beragam etnis di bawah pemerintahan Aghlabiyah. Dihuni oleh berbagai komunitas seperti Arab, Berber, dan Persia, serta berbagai kelompok lain, termasuk *mawali* dan budak dari berbagai suku. Struktur sosialnya menunjukkan pembagian yang jelas antara rakyat jelata (*amma*) dan elit penguasa aristokrasi (*hassa*). Hubungan yang kompleks antara rezim penguasa dan otoritas keagamaan, terutama ulama Mazhab Maliki, yang sangat berpengaruh di kalangan mayoritas penduduk, merupakan aspek penting dari sejarah sosial Aghlabiyah. Meskipun penguasa Aghlabiyah mungkin awalnya menganut kepercayaan atau teologi yang berbeda, mereka akhirnya harus mengatasi kekuatan sosial ulama Mazhab Maliki. Perkembangan dalam studi fiqh, yang ditunjukkan oleh kontribusi Asad b. al-Furat yang eklektik dan, khususnya, upaya untuk standarisasi dogmatis Mazhab Maliki oleh Sahnun melalui al-Mudawanna, mengukuhkan dominasi mazhab ini dan memberikan dasar teologis untuk "penentangan saleh" terhadap kebijakan rezim yang dianggap tidak adil atau melanggar norma agama, seperti kritik terhadap sistem perpajakan.

Menjelang akhir kekuasaan Dinasti Aghlabiyah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang lemah serta tekanan dari luar. Pemerintahan amir terakhir, Ziyadatullah III, ditandai oleh kemewahan dan ketidakpedulian, sementara

pengaruh Syi'ah berkembang di kalangan pejabat. Tindakan tiranik Amir Ibrahim II, termasuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap pemimpin militer dan bangsawan Arab serta perampasan harta mereka untuk sentralisasi kekuasaan dan perekrutan pasukan budak, secara efektif menghancurkan aliansi tradisional dan memperdalam ketidakpuasan internal. Secara keseluruhan, interaksi antara kelemahan internal, ketegangan sosial-politik, dan kebangkitan kekuatan Fatimiyah yang berhasil menggalang dukungan substansial di kalangan Berber melalui propaganda Abu Abdullah al-Shi'i, berujung pada kekalahan militer Dinasti Aghlabiyah pada tahun 909 M dan pengusiran Ziyadatullah III. Meskipun berumur relatif pendek, Dinasti Aghlabiyah memberikan dampak yang signifikan dalam sejarah sosial Ifriqiyah. Hal ini terlihat dari proses urbanisasi dan perkembangan ekonomi yang terjadi, serta pembentukan identitas keagamaan Mazhab Maliki. Selain itu, terdapat dinamika hubungan yang kompleks antara penguasa, ulama, dan berbagai kelompok sosial di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abun Nasr, Jamil M. *A History of The Maghrib in The Islamic Period*. 2nd ed. London: Cambridge University Press, 1975.
- Bakri, Syamsul. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Edited by Agus Wahyudi. Surakarta: Efudepress (Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta), 2022.
- Bosworth, Clifford Edmund. *Islamic Dynasties*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. 10th ed. London: Macmillan Education, 1970.
- Imam Fuadi. *Sejarah BPeradaban Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kartini, Ajeng, and Wahyuni Amalia. *History of Islam*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2023.
- Kennedy, Hugh. "The Origins of The Aghlabids." In *The Aghlabids and Their Neighbors*, edited by Maribel Fierro, Renata Holod, M.Sukru Hanioglu, and Florian Schwarz, 122:33–48. Boston: Brill, 2018.
- Marzuenda. "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam (Islam Di Afrika Utara Dan Afrika Selatan)." *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 10, no. 1 (March 2021).
- Mustaghfirin, Ahmad. "Islamisasi Di Afrika Sub-Sahara." *Dirasat: Jurnal Studi Islam dan Peradaban* 14, no. 2 (2019): 129–146.
- Nunzairina. "Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan Dan Kebangkitan Kaum Intelektual." *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 3, no. 2 (January 2020): 93–103.
- Syhraeni, Andi. "Dinasti-Dinasti Kecil Abbasiyah." *Jurnal Rihlah* 4, no. 1 (2016).
- W, Montgomery Watt. *Kejayaan Islam Kajian Kritis Dan Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Zubaidah, Siti. *Sejarah Peradaban Islam*. Edited by Nurika Khalila Daulay. Medan: Perdana Publishing, 2016.